

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2018**



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

- 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 28 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Timur yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Barito Timur yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
15. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
16. Tunjangan BPD merupakan Bantuan Pendapatan bagi BPD yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan atas jabatannya.
17. Insentif RT merupakan Bantuan Pendapatan bagi RT yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan atas jabatannya.
18. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
19. SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, yaitu selisih antara Surplus/Defisit dengan pembiayaan netto;

20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25. Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
26. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana Desa yang akan diterima diterima oleh setiap des, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan Puluh Persen) dari anggaran Dana Desa Dibagi Dengan jumlah Desa secara Nasional.
27. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayahn desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabuapaten/ kota.

BAB II PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2018 terdiri dari :
 - a. Anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. SILTAP , Tunjangan BPD dan Gotong Royong.
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar **Rp. 54.059.229.400,-** (lima puluh empat milyar lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari Kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan Siltap dan tunjangan BPD dari total pagu anggaran dibagi kepada 101 desa dan Dana Gotong Royong bagi 101 Desa;
 - b. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Barito Timur yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dialokasikan berdasarkan jumlah perangkat desa yang tersedia, jumlah BPD yang tersedia dan untuk dana gotong royong di hitung berdasarkan banyaknya jumlah penduduk desa.

Pasal 5

Besaran ADD yang diberikan kepada Setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{BD}_x \times \text{ADD}$$

Keterangan :

- a. ADD_x : ADD yang diberikan kepada Desa x.
- b. BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- c. ADD : ADD untuk seluruh Desa.

Pasal 6

- (1) SILTAP Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b), dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.

- b. SILTAP Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
 - c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
 - d. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
 - e. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan.
 - f. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
 - g. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (2) Untuk Pembayaran Insentif RT, Insentif Bendahara Desa, serta Insentif Penjabat Kepala Desa dimasukkan dalam Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
 - b. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
 - c. Insentif Bendahara sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
 - d. Bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa maka berhak mendapatkan insentif Penjabat Kepala Desa yang diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- (3) Untuk Pembayaran Insentif Penghulu Adat dan Mantir Adat dimasukkan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Insentif Penghulu Adat Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Insentif Mantir Adat Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

BAB III

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pajak atas pembelian barang/jasa (PPN dan PPh) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan oleh masing-masing Desa dengan menggunakan NPWP Desa;
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip Penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD gunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut (terlampir dalam besaran dan peruntukkan ADD lampiran II) :

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. 40 % bagi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. 10% bagi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. 35 % bagi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. 15% bagi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimaksud pada huruf d dapat juga digunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa .
- (2) Besaran dan peruntukkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan insentif, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Insentif Tim Pengelola SISKEUDES;
 - 2) Insentif Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - 3) Insentif Bendahara Desa;
 - 4) Insentif RT;
 - 5) Belanja Rapat;
 - 6) Belanja Musyawarah Desa;
 - 7) Biaya Pelaksanaan Pilkades hari Pemungutan Suara;
 - 8) Biaya Pemilihan BPD;
 - 9) Biaya Seleksi Perangkat Desa;
 - 10) Biaya Pembayaran 3% BPJS Bagi Pemerintah Desa & BPD;
 - 11) Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan foto copy, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, serta operasional pemerintahan desa lainnya.

- b. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - 1) Biaya Rapat;
 - 2) Biaya Musyawarah Desa;
 - 3) Biaya Operasional dan Administrasi Umum;
 - 4) Serap Aspirasi;
 - 5) Perjalanan Dinas; dan
 - 6) Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintahan Desa.
- c. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- d. ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Profil Desa, antara lain untuk :
 - 1) Biaya internet dan/atau Pulsa untuk internet;
 - 2) Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Bantuan transportasi bagi pokja profil desa;
 - 4) Insentif Pokja.
- e. Bagi Desa yang Penyaluran ADD Tahap III baru dicairkan pada bulan Desember Tahun 2018 atau Januari Tahun 2019 maka penggunaan ADD boleh sampai triwulan pertama di Tahun 2019.

Pasal 11

- 1. Insentif Tim Pengelola Siskeudes, PTPKD, Insentif Bendahara Desa serta Insentif RT & RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Insentif Penghulu Adat & Mantir Adat di alokasikan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan serta untuk kegiatan pembinaan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan kelembagaan desa lainnya yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- 3. Pelatihan-Pelatihan, Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD dialokasikan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan dengan pendanaan ADD pada tahun yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara kontrak tahun jamak (*multi years contract*);
- (2) Untuk setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang disusun oleh TPK dan tertuang dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Pengadaan barang dan jasa di desa;
- (3) Dalam keadaan tertentu, maksimal 2 % (dua per seratus) dari ADD non belanja pegawai dapat dipergunakan untuk bantuan penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam disesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.

Pasal 13

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi dan pembangunan tempat ibadah baru.

Pasal 14

1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dicantumkan dalam APBDes pada jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak;
 - c. Bagi Hasil Retribusi;
 - d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dicantumkan dalam APBDes pada jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
4. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dicantumkan dalam APBDes pada jenis pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 15

1. Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
3. Bupati Barito Timur Memerintahkan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur.

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara bertahap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Februari sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagai Uang Persediaan (UP) bagi desa untuk mengawali kegiatan;
 - b. Tahap II pada bulan Mei sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Tahap III pada bulan September Sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Rincian penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

1. Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagai Uang Persediaan (UP) bagi desa untuk mengawali kegiatan dari pagu ADD, dapat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dengan format Aplikasi SISKEUDes;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Januari tahun 2018;

Pasal 18

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari pagu dapat ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2018;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap I (70%) tahun anggaran 2017;
- c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun 2017;
- d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dengan format Aplikasi SISKEUDes;
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat);
- g. Dokumen tersebut huruf a dan b dibuat sesuai contoh format dalam lampiran III Peraturan Bupati Barito Timur ini.

Pasal 19

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu dapat ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2018;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap II tahun 2018;
- c. Laporan realisasi anggaran (LRA) semester 1 ADD tahap II tahun anggaran 2018;

- d. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Camat;
- e. Dokumen tersebut huruf a dan b dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran III Peraturan Bupati Barito Timur ini.

Pasal 20

- (1) Spesimen tanda tangan Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak aktif, maka dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan & Bendahara Desa;
- (3) Apabila Sekretaris Desa tidak aktif, maka dapat ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa;
- (4) Bagi Pejabat yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) harus ada surat tertulis atau surat keterangan dari Camat.

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 22

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah sebelum dilakukan pencairan anggaran tahap berikutnya dan di verifikasi serta dikumpulkan di kecamatan masing-masing sebagai bagian dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak kecamatan;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur

Pasal 24

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur Sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan TPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu TPK dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDes untuk disampaikan kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA SKPD masing-masing.

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 15 MARET 2018

Plt. BUPATI BARITO TIMUR,

H. SURIANSYAH

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 15 MARET 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR...6...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Desa	Siltap + Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD	Gotong royong	Total	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD per-Desa	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (8) + (11) + (14) + (17)	(19)	(20) = (3) + (19)	
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR																			
1	PULAU PATAI	230,760,000	42,000,000	272,760,000	389	0.0048	0.00121	71	0.01061	0.00371394	182.63	0.04899	0.0049	43.32	0.010	0.002926378	0.013	341,734,100	614,494,100	
2	SARAPAT	277,560,000	48,000,000	325,560,000	787	0.0070	0.00176	38	0.00568	0.001987745	80.20	0.02151	0.00215	30.28	0.007	0.002045087	0.008	212,902,400	538,462,400	
3	MAGANTIS	255,960,000	60,000,000	315,960,000	1484	0.0151	0.00378	18	0.00269	0.00094156	90.44	0.02426	0.00243	40.14	0.009	0.00271153	0.010	264,234,300	580,194,300	
4	JA'AR	252,360,000	60,000,000	312,360,000	2702	0.0297	0.00743	26	0.00389	0.001360036	45.09	0.0121	0.00121	25.65	0.006	0.00173265	0.012	314,715,500	627,075,500	
5	MATABU	255,960,000	42,000,000	297,960,000	2412	0.0277	0.00693	50	0.00747	0.002615454	30.06	0.00806	0.00081	35.19	0.008	0.002377229	0.013	341,256,000	639,216,000	
6	DORONG	255,960,000	42,000,000	297,960,000	878	0.0123	0.00308	22	0.00329	0.0011508	25.05	0.00672	0.00067	48.80	0.011	0.003296664	0.008	219,937,700	517,897,700	
7	DIDI	255,960,000	42,000,000	297,960,000	546	0.0068	0.00171	28	0.00418	0.001464654	23.25	0.00624	0.00062	39.16	0.009	0.002645401	0.006	172,845,600	470,805,600	
8	KARANG LANGIT	205,560,000	42,000,000	247,560,000	728	0.0091	0.00228	33	0.00493	0.001726199	23.30	0.00625	0.00062	37.34	0.008	0.002522504	0.007	191,748,900	439,308,900	
9	HARINGEN	227,160,000	36,000,000	263,160,000	820	0.0090	0.00225	107	0.01599	0.005597071	28.56	0.00766	0.00077	48.67	0.011	0.003287377	0.012	319,139,100	582,299,100	
10	JAWETEN	255,960,000	54,000,000	309,960,000	1860	0.0206	0.00515	91	0.0136	0.004760126	26.18	0.00702	0.0007	22.04	0.005	0.00148884	0.012	324,451,700	634,411,700	
11	MATARAH	230,760,000	36,000,000	266,760,000	742	0.0084	0.0021	57	0.00852	0.002981617	45.09	0.0121	0.00121	35.66	0.008	0.002408748	0.009	233,221,800	499,981,800	
12	MARAGUT	230,760,000	42,000,000	272,760,000	615	0.0073	0.00183	21	0.00314	0.001098491	45.09	0.0121	0.00121	46.12	0.010	0.003115253	0.007	194,446,000	467,206,000	
13	MANGKARAP	255,960,000	42,000,000	297,960,000	448	0.0053	0.00132	41	0.00613	0.002144672	45.09	0.0121	0.00121	50.11	0.011	0.003384794	0.008	215,975,400	513,935,400	
14	GUMPA	230,760,000	42,000,000	272,760,000	752	0.0131	0.00328	68	0.01016	0.003557017	45.09	0.0121	0.00121	42.70	0.010	0.002884578	0.011	293,107,500	565,867,500	
15	SUMUR	255,960,000	42,000,000	297,960,000	550	0.0089	0.00222	10	0.00149	0.000523091	20.04	0.00538	0.00054	31.29	0.007	0.002113885	0.005	144,557,300	442,517,300	
16	HARARA	230,760,000	36,000,000	266,760,000	132	0.0014	0.00036	6	0.0009	0.000313854	68.67	0.01842	0.00184	62.61	0.014	0.004229375	0.007	180,927,600	447,687,600	
		3,908,160,000	708,000,000	4,616,160,000	15,845	0.1867	0.04667	687	0.10268	0.035936332	823.86	0.22099	0.0221	639.10	0.144	0.043170294	0.148	3,965,201,600	8,581,360,900	
II	KECAMATAN BENUA LIMA																			
1	KANDRIS	230,760,000	48,000,000	278,760,000	1503	0.0161	0.00403	30	0.00448	0.001569272	6.01	0.00161	0.00016	43.98	0.010	0.00297097	0.009	234,135,800	512,895,800	
2	BANYU LANDAS	205,560,000	42,000,000	247,560,000	632	0.0070	0.00176	16	0.00239	0.000836945	10.02	0.00269	0.00027	33.45	0.008	0.002259432	0.005	137,393,300	384,953,300	
3	BAGOK	205,560,000	42,000,000	247,560,000	585	0.0068	0.00171	34	0.00508	0.001778508	63.13	0.01693	0.00169	23.67	0.005	0.001598653	0.007	181,801,800	429,361,800	
4	BAMBAN	230,760,000	42,000,000	272,760,000	963	0.0118	0.00296	55	0.00822	0.002876999	45.09	0.0121	0.00121	44.68	0.010	0.003018134	0.010	269,830,800	542,590,800	
5	TEWAH PUPUH	205,560,000	48,000,000	253,560,000	1110	0.0133	0.00332	64	0.00957	0.003347781	59.12	0.01586	0.00159	40.99	0.009	0.002768775	0.011	295,570,000	549,130,000	
6	GUDANG SENG	230,760,000	36,000,000	266,760,000	118	0.0013	0.00032	12	0.00179	0.000627709	15.03	0.00403	0.0004	40.59	0.009	0.002741811	0.004	109,864,700	378,620,600	
		1,308,960,000	258,000,000	1,566,960,000	4,911	0.0564	0.0141	211	0.03153	0.011037214	198.41	0.05322	0.00532	227.36	0.051	0.015357774	0.046	1,228,596,600	2,797,552,300	

III																			
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI																			
1	PUJAU PADANG	230.760.000	36.000.000	266.760.000	468	0,0051	0,00127	34	0,00508	0,001778508	10,02	0,00269	0,00027	33,78	0,008	0,002282074	0,006	150,118.400	416.878.400
2	KAMBITIN	230.760.000	42.000.000	272.760.000	445	0,0052	0,0013	9	0,00135	0,000470782	8,02	0,00215	0,00022	37,64	0,008	0,002542403	0,005	121,523.700	394.283.700
3	RAMANNA	205.560.000	42.000.000	247.560.000	446	0,0053	0,00134	19	0,00284	0,000998872	7,01	0,00388	0,00018	48,01	0,011	0,003242774	0,006	154.464.100	402.024.100
4	BENTOT	281.160.000	60.000.000	341.160.000	2340	0,0302	0,00754	81	0,01211	0,004237035	51,11	0,01377	0,000137	37,07	0,008	0,002503846	0,016	419.739.300	760.899.300
5	AMPARI BURA	227.160.000	42.000.000	269.160.000	797	0,0121	0,00301	9	0,00135	0,000470782	29,06	0,00779	0,00078	44,95	0,010	0,003036598	0,007	195.748.300	464.908.300
6	KOTAM	205.560.000	42.000.000	247.560.000	658	0,0086	0,00216	31	0,00463	0,001621581	45,16	0,01211	0,000121	61,21	0,014	0,004134946	0,009	244.716.200	492.276.200
7	BETANG NALONG	230.760.000	42.000.000	272.760.000	271	0,0037	0,00092	24	0,00359	0,001255418	8,02	0,00215	0,00022	48,96	0,011	0,003172206	0,006	149.196.100	421.956.100
8	MAWANI	230.760.000	36.000.000	266.760.000	136	0,0076	0,00189	43	0,00643	0,00224929	28,00	0,00751	0,00075	68,34	0,015	0,004616463	0,010	254.892.600	521.652.600
9	JANGO	230.760.000	48.000.000	278.760.000	340	0,0057	0,00141	33	0,00493	0,001726199	29,06	0,00779	0,00078	65,77	0,015	0,004442325	0,008	224.220.800	502.980.800
10	LALAP	230.760.000	48.000.000	278.760.000	757	0,0125	0,00313	3	0,00045	0,000156927	32,07	0,0086	0,00086	45,85	0,010	0,003097257	0,007	194.228.800	472.988.800
		2.304.000.000	438.000.000	2.742.000.000	6.658	0,0959	0,02398	286	0,04274	0,014960395	247,52	0,06639	0,00664	489,59	0,110	0,033070891	0,079	2.108.848.800	4.850.848.300
IV																			
KECAMATAN AWANG																			
1	JANAH JARI	230.760.000	42.000.000	272.760.000	801	0,0083	0,00208	57	0,00852	0,002981617	21,04	0,00564	0,00056	45,70	0,010	0,003087265	0,009	233.729.300	506.489.300
2	BANGKIRAYEN	205.560.000	42.000.000	247.560.000	624	0,0076	0,00189	6	0,0009	0,000313854	22,05	0,00591	0,00059	42,09	0,009	0,00284333	0,006	151.169.000	398.729.000
3	HAYAPING	230.760.000	48.000.000	278.760.000	1362	0,0192	0,00479	66	0,00986	0,003452399	23,05	0,00618	0,00062	42,14	0,009	0,002846457	0,012	313.899.900	592.659.900
4	TANGKANI	205.560.000	42.000.000	247.560.000	534	0,0061	0,00152	45	0,00673	0,002353908	23,05	0,00618	0,00062	44,84	0,010	0,003028546	0,008	201.615.000	449.175.000
5	WUNGGUR NAKKAKAN	252.360.000	36.000.000	288.360.000	446	0,0050	0,00125	16	0,00239	0,000836945	14,03	0,00376	0,00038	58,54	0,013	0,003954369	0,006	172.207.200	460.567.200
6	AMPARI	205.560.000	36.000.000	241.560.000	420	0,0049	0,00124	2	0,0003	0,000104618	41,09	0,01102	0,00039	58,90	0,013	0,003978465	0,006	153.110.600	394.670.600
7	APAR BATU	227.160.000	42.000.000	269.160.000	532	0,0072	0,00181	51	0,00762	0,002667763	10,02	0,00269	0,00027	47,46	0,011	0,003205529	0,009	235.596.900	504.756.900
8	BIWAN	205.560.000	36.000.000	241.560.000	282	0,0039	0,00098	14	0,00209	0,000733227	10,02	0,00269	0,00027	57,21	0,013	0,003864281	0,006	156.645.000	398.205.000
9	JANAH MANSIWUI	230.760.000	36.000.000	266.760.000	415	0,0058	0,00145	32	0,00478	0,00167389	10,02	0,00269	0,00027	47,04	0,011	0,003177614	0,007	176.143.400	442.903.400
10	DANAU	230.760.000	36.000.000	266.760.000	380	0,0046	0,00114	38	0,00588	0,001987745	10,02	0,00269	0,00027	52,82	0,012	0,003567681	0,007	186.861.300	453.621.300
11	PIANGGU	205.560.000	36.000.000	241.560.000	248	0,0029	0,00072	39	0,00583	0,002040054	14,53	0,0039	0,00039	62,37	0,015	0,004415939	0,008	202.988.000	444.548.000
		2.430.360.000	432.000.000	2.862.360.000	6.044	0,0755	0,01888	366	0,0547	0,01914512	203,42	0,05456	0,000546	562,11	0,127	0,037696476	0,081	2.183.966.000	5.046.325.600
V																			
KECAMATAN PUSUN TENGAH																			
1	SAING	205.560.000	36.000.000	241.560.000	789	0,0090	0,00225	158	0,02361	0,008264833	29,06	0,00779	0,00078	26,72	0,006	0,001804947	0,013	351.205.900	592.765.900
2	RODOK	255.960.000	60.000.000	315.960.000	1994	0,0193	0,00483	541	0,02885	0,02829208	24,35	0,00653	0,00065	36,87	0,008	0,002490315	0,036	972.708.400	1.288.668.400
3	AMPAN II	205.560.000	48.000.000	253.560.000	639	0,0068	0,00171	191	0,02855	0,009991033	7,01	0,00188	0,00019	44,52	0,010	0,002807278	0,015	399.348.500	652.908.500
4	PUTAI	205.560.000	48.000.000	253.560.000	2039	0,0240	0,006	199	0,02974	0,010409505	10,02	0,00269	0,00027	39,75	0,009	0,003684999	0,019	519.304.400	772.864.400
5	NETAMPIN	205.560.000	48.000.000	253.560.000	1476	0,0151	0,00377	45	0,00673	0,002353908	105,22	0,02822	0,00282	33,76	0,008	0,002280724	0,011	301.029.600	554.589.600
6	SUMBER GARUNGUNG	230.760.000	48.000.000	278.760.000	856	0,0173	0,00432	85	0,0127	0,004446271	25,75	0,00691	0,00069	36,31	0,008	0,002452824	0,012	319.355.300	598.115.300
7	MUARA AWANG	230.760.000	42.000.000	272.760.000	662	0,0108	0,0027	53	0,00792	0,002772381	120,25	0,03226	0,00323	51,56	0,012	0,003483782	0,012	326.627.200	599.387.200
8	DAMBUNG	230.760.000	42.000.000	272.760.000	1207	0,0083	0,00207	293	0,04379	0,015326558	50,00	0,01341	0,00134	68,34	0,015	0,004616236	0,023	626.345.600	899.105.600
		1.770.480.000	372.000.000	2.142.480.000	9.662	0,1106	0,02765	1.565	0,2339	0,081863698	371,67	0,09969	0,00097	337,83	0,076	0,022820106	0,142	3.815.925.400	5.958.404.900
VI																			
PENMANG KARAU																			
1	MUARA PLANTAU	230.760.000	54.000.000	284.760.000	1588	0,0198	0,00494	293	0,04379	0,015326558	172,36	0,04623	0,00462	49,01	0,011	0,002331074	0,028	756.175.100	1.040.935.100
2	KETAB	205.560.000	48.000.000	253.560.000	1116	0,0141	0,00353	237	0,03542	0,012396725	43,09	0,01156	0,00116	43,48	0,010	0,002936714	0,020	536.792.200	790.352.200
3	KUPANG BERSIH	205.560.000	42.000.000	247.560.000	1079	0,0131	0,00327	327	0,04887	0,017105671	52,11	0,0198	0,0014	55,38	0,012	0,003741106	0,026	664.016.600	931.576.600
4	TUYAU	230.760.000	48.000.000	278.760.000	1501	0,0199	0,00497	100	0,01495	0,00230907	16,03	0,00443	0,00043	39,53	0,009	0,002668948	0,013	356.703.300	635.463.300
5	PINANG TUNGGAL	205.560.000	36.000.000	241.560.000	438	0,0047	0,00117	17	0,00254	0,000889254	42,09	0,01129	0,000113	57,53	0,013	0,00388632	0,007	189.791.000	431.351.000
6	NAGALEAH	199.560.000	42.000.000	241.560.000	633	0,0079	0,00198	44	0,00658	0,002301599	21,04	0,00564	0,00056	51,88	0,012	0,003504674	0,008	223.813.000	465.373.000
7	LAMPEONG	224.760.000	42.000.000	266.760.000	1037	0,0112	0,0028	143	0,02137	0,007480197	42,09	0,01129	0,000113	30,32	0,007	0,002048291	0,013	360.822.400	627.582.400
8	BARAWA	199.560.000	42.000.000	241.560.000	685	0,0080	0,002	208	0,03109	0,010880287	12,03	0,00246	0,00032	43,12	0,010	0,002912834	0,016	432.033.700	673.593.700
9	BAMBULLUNG	246.360.000	60.000.000	306.360.000	2453	0,0242	0,00604	273	0,0408	0,014280377	91,19	0,02446	0,00045	26,39	0,006	0,001182407	0,025	658.366.400	964.726.400
10	LEBO	205.560.000	42.000.000	247.560.000	693	0,0076	0,00191	99	0,0148	0,0005178598	38,08	0,01021	0,000102	41,41	0,009	0,002796846	0,011	292.366.600	539.926.600
11	MURU DUYUNG	230.760.000	36.000.000	266.760.000	214	0,0031	0,00078	43	0,00643	0,00224929	26,05	0,00699	0,0007	43,79	0,010	0,002957811	0,007	179.264.300	446.024.300
12	TUMPUYUNG	230.760.000	42.000.000	272.760.000	726	0,0145	0,00243	97	0,0145	0,00507398	12,03	0,00323	0,00032	40,43	0,009	0,002731065	0,011	282.964.300	555.724.300
13	SUMBER REJO	205.560.000	42.000.000	247.560.000	684	0,0087	0,00216	44	0,00658	0,002301599	12,03	0,00323	0,00032</						

X	KECAMATAN KARUSEN JANANG																			
1	DAYU	230,760,000	48,000,000	278,760,000	1876	0.0183	0.00459	145	0.02167	0.007584815	73.15	0.01962	0.00196	23.48	0.005	0.001586011	0.016	421,510,000	700,270,000	
2	WURAN	205,560,000	36,000,000	241,560,000	1135	0.0158	0.00395	119	0.01779	0.00622478	20.04	0.00538	0.00054	42.16	0.009	0.002847842	0.014	363,584,800	605,144,800	
3	IPU MEA	205,560,000	54,000,000	259,560,000	464	0.0058	0.00146	31	0.00463	0.001621581	27.06	0.00726	0.00073	55.52	0.013	0.003750488	0.008	202,665,800	462,225,800	
4	LAGAN	230,760,000	42,000,000	272,760,000	486	0.0061	0.00153	35	0.00523	0.001830818	14.03	0.00376	0.00038	45.10	0.010	0.003046419	0.007	181,891,800	454,651,800	
5	PUTUT TAWULUH	205,560,000	36,000,000	241,560,000	146	0.0024	0.0006	39	0.00583	0.002040054	15.03	0.00403	0.0004	64.93	0.015	0.004385974	0.007	199,126,500	440,686,500	
6	SIMPANG NANENG	230,760,000	42,000,000	272,760,000	506	0.0066	0.00166	19	0.00284	0.000993872	14.03	0.00376	0.00038	35.82	0.008	0.002419287	0.005	146,051,500	418,811,500	
7	KANDRIS	205,560,000	36,000,000	241,560,000	279	0.0037	0.00092	22	0.00329	0.0011508	15.03	0.00403	0.0004	41.69	0.009	0.002816283	0.005	141,814,500	380,067,400	
		1,514,520,000	294,000,000	1,808,520,000	4,892	0.0588	0.0147	410	0.06128	0.021446719	178.37	0.04785	0.00478	308.70	0.070	0.020852305	0.062	1,656,645,200	3,461,857,800	
		22,912,680,000	4,332,000,000	27,244,680,000	84,006	1	0.25	6,691	1	0.35	3,728	1	0.1	4,441	1	0.3	1	26,814,549,400	54,059,229,400	

Kontrol Penghitungan	
ADD Bartim 2017	54,059,229,400
Saldo Dari Siltap dan Gotong Royong	26,814,549,400
Total Siltap dan Gotong Royong	27,244,680,000

Bobot	
(c) JP	25% (g)
(d) AK	35% (h)
(e) LW	10% (i)
(f) IKG	30% (j)

Pt. BUPATI BARITO TIMUR


H. SURIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ADD DAN MASING-MASING PERUNTUKANNYA TA. 2018

No	Kecamatan/Desa	Pagu ADD	Dana Golong Royong	Silap & Tunjangan BPD	Sisa Dana setelah dikurangi kolom (4) & (5)	Bidang Penyelenggaraan Pemdes 40 % dari kolom (6)	Bidang Pembangunan Desa 10% dari kolom (6)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 35% dari kolom 6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15% dari kolom (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KECAMATAN DUSUN TIMUR								
1	PULAU PATAI	Rp 614,494,100	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 341,734,100	Rp 136,693,640	Rp 34,173,410	Rp 119,606,935	Rp 51,260,115
2	SARAPAT	Rp 538,462,400	Rp 48,000,000	Rp 277,560,000	Rp 212,902,400	Rp 85,160,960	Rp 21,290,240	Rp 74,515,840	Rp 31,935,360
3	MAGANTIS	Rp 580,194,300	Rp 60,000,000	Rp 255,960,000	Rp 264,234,300	Rp 105,693,720	Rp 26,423,430	Rp 92,482,005	Rp 39,635,145
4	JA'AR	Rp 627,075,500	Rp 60,000,000	Rp 252,360,000	Rp 314,715,500	Rp 125,886,200	Rp 31,471,550	Rp 110,150,425	Rp 47,207,325
5	MATABU	Rp 639,216,000	Rp 42,000,000	Rp 255,960,000	Rp 341,256,000	Rp 136,502,400	Rp 34,125,600	Rp 119,439,600	Rp 51,188,400
6	DORONG	Rp 517,897,700	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 245,137,700	Rp 98,055,080	Rp 24,513,770	Rp 85,798,195	Rp 36,770,655
7	DIDI	Rp 470,805,600	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 198,045,600	Rp 79,218,240	Rp 19,804,560	Rp 69,315,960	Rp 29,706,840
8	KARANG LANGIT	Rp 439,308,900	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 191,748,900	Rp 76,699,560	Rp 19,174,890	Rp 67,112,115	Rp 28,762,335
9	HARINGEN	Rp 582,299,100	Rp 36,000,000	Rp 227,160,000	Rp 319,139,100	Rp 127,655,640	Rp 31,913,910	Rp 111,698,685	Rp 47,870,865
10	JAWETEN	Rp 634,411,700	Rp 54,000,000	Rp 255,960,000	Rp 324,451,700	Rp 129,780,680	Rp 32,445,170	Rp 113,558,095	Rp 48,667,755
11	MATARAH	Rp 499,981,800	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 233,221,800	Rp 93,288,720	Rp 23,322,180	Rp 81,627,630	Rp 34,983,270
12	MARAGUT	Rp 467,206,000	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 194,446,000	Rp 77,778,400	Rp 19,444,600	Rp 68,056,100	Rp 29,166,900
13	MANGKARAP	Rp 513,935,400	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 241,175,400	Rp 96,470,160	Rp 24,117,540	Rp 84,411,390	Rp 36,176,310
14	GUMPA	Rp 565,867,500	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 293,107,500	Rp 117,243,000	Rp 29,310,750	Rp 102,587,625	Rp 43,966,125
15	SUMUR	Rp 442,517,300	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 169,757,300	Rp 67,902,920	Rp 16,975,730	Rp 59,415,055	Rp 25,463,595
16	HARARA	Rp 447,687,600	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 180,927,600	Rp 72,371,040	Rp 18,092,760	Rp 63,324,660	Rp 27,139,140
		Rp 8,581,360,900	Rp 708,000,000	Rp 3,908,160,000	Rp 3,965,200,900	Rp 1,586,080,360	Rp 396,520,090	Rp 1,423,100,315	Rp 594,780,135

II	KECAMATAN BENUA LIMA									
1	KANDRIS	Rp 512,895,800	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 234,135,800	Rp 93,654,320	Rp 23,413,580	Rp 81,947,530	Rp 35,120,370	
2	BANYU LANDAS	Rp 384,953,300	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 137,393,300	Rp 54,957,320	Rp 13,739,330	Rp 48,087,655	Rp 20,608,995	
3	BAGOK	Rp 429,361,800	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 181,801,800	Rp 72,720,720	Rp 18,180,180	Rp 63,630,630	Rp 27,270,270	
4	BAMBAN	Rp 542,590,800	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 269,830,800	Rp 107,932,320	Rp 26,983,080	Rp 94,440,780	Rp 40,474,620	
5	TEWAH PUPUH	Rp 549,130,000	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 295,570,000	Rp 118,228,000	Rp 29,557,000	Rp 103,449,500	Rp 44,335,500	
6	GUDANG SENG	Rp 378,620,600	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 111,860,600	Rp 44,744,240	Rp 11,186,060	Rp 39,151,210	Rp 16,779,090	
		Rp 2,797,552,300	Rp 258,000,000	Rp 1,308,960,000	Rp 1,230,592,300	Rp 492,236,920	Rp 123,059,230	Rp 430,707,305	Rp 184,588,845	
III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI									
1	PULAU PADANG	Rp 416,878,400	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 150,118,400	Rp 60,047,360	Rp 15,011,840	Rp 52,541,440	Rp 22,517,760	
2	KAMBITIN	Rp 394,283,700	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 121,523,700	Rp 48,609,480	Rp 12,152,370	Rp 42,533,295	Rp 18,228,555	
3	RAMANIA	Rp 402,024,100	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 154,464,100	Rp 61,785,640	Rp 15,446,410	Rp 54,062,435	Rp 23,169,615	
4	BENTOT	Rp 760,899,300	Rp 60,000,000	Rp 281,160,000	Rp 419,739,300	Rp 167,895,720	Rp 41,973,930	Rp 146,908,755	Rp 62,960,895	
5	AMPARI BURA	Rp 464,908,300	Rp 42,000,000	Rp 227,160,000	Rp 195,748,300	Rp 78,299,320	Rp 19,574,830	Rp 68,511,905	Rp 29,362,245	
6	KOTAM	Rp 492,276,200	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 244,716,200	Rp 97,886,480	Rp 24,471,620	Rp 85,650,670	Rp 36,707,430	
7	BETANG NALONG	Rp 421,956,100	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 149,196,100	Rp 59,678,440	Rp 14,919,610	Rp 52,218,635	Rp 22,379,415	
8	MAWANI	Rp 521,652,600	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 254,892,600	Rp 101,957,040	Rp 25,489,260	Rp 89,212,410	Rp 38,233,890	
9	JANGO	Rp 502,980,800	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 224,220,800	Rp 89,688,320	Rp 22,422,080	Rp 78,477,280	Rp 33,633,120	
10	LALAP	Rp 472,988,800	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 194,228,800	Rp 77,691,520	Rp 19,422,880	Rp 67,980,080	Rp 29,134,320	
		Rp 4,850,848,300	Rp 438,000,000	Rp 2,304,000,000	Rp 2,108,848,300	Rp 843,539,320	Rp 210,884,830	Rp 738,096,905	Rp 316,327,245	
IV	KECAMATAN AWANG									
1	JANAH JARI	Rp 506,489,300	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 233,729,300	Rp 93,491,720	Rp 23,372,930	Rp 81,805,255	Rp 35,059,395	
2	BANGKIRAYEN	Rp 398,729,000	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 151,169,000	Rp 60,467,600	Rp 15,116,900	Rp 52,909,150	Rp 22,675,350	
3	HAYAPING	Rp 592,659,900	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 313,899,900	Rp 125,559,960	Rp 31,389,990	Rp 109,864,965	Rp 47,084,985	
4	TANGKAN	Rp 449,175,000	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 201,615,000	Rp 80,646,000	Rp 20,161,500	Rp 70,565,250	Rp 30,242,250	
5	WUNGKUR NANAKAN	Rp 460,567,200	Rp 36,000,000	Rp 252,360,000	Rp 172,207,200	Rp 68,882,880	Rp 17,220,720	Rp 60,272,520	Rp 25,831,080	
6	AMPARI	Rp 394,670,600	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 153,110,600	Rp 61,244,240	Rp 15,311,060	Rp 53,588,710	Rp 22,966,590	
7	APAR BATU	Rp 504,756,900	Rp 42,000,000	Rp 227,160,000	Rp 235,596,900	Rp 94,238,760	Rp 23,559,690	Rp 82,458,915	Rp 35,339,535	
8	BIWAN	Rp 398,205,000	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 156,645,000	Rp 62,658,000	Rp 15,664,500	Rp 54,825,750	Rp 23,496,750	
9	JANAH MANSIWUI	Rp 442,903,400	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 176,143,400	Rp 70,457,360	Rp 17,614,340	Rp 61,650,190	Rp 26,421,510	
10	DANAU	Rp 453,621,300	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 186,861,300	Rp 74,744,520	Rp 18,686,130	Rp 65,401,455	Rp 28,029,195	
11	PIANGGU	Rp 444,548,000	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 202,988,000	Rp 81,195,200	Rp 20,298,800	Rp 71,045,800	Rp 30,448,200	
		Rp 5,046,325,600	Rp 432,000,000	Rp 2,430,360,000	Rp 2,183,965,600	Rp 873,586,240	Rp 218,396,560	Rp 764,387,960	Rp 327,594,840	

V	KECAMATAN DUSUN TENGAH									
1	SAING	Rp 592,765,900	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 351,205,900	Rp 140,482,360	Rp 35,120,590	Rp 122,922,065	Rp 52,680,885	
2	RODOK	Rp 1,288,668,400	Rp 60,000,000	Rp 255,960,000	Rp 972,708,400	Rp 389,083,360	Rp 97,270,840	Rp 340,447,940	Rp 145,906,260	
3	AMPAH II	Rp 652,908,500	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 399,348,500	Rp 159,739,400	Rp 39,934,850	Rp 139,771,975	Rp 59,902,275	
4	PUTAI	Rp 772,864,400	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 519,304,400	Rp 207,721,760	Rp 51,930,440	Rp 181,756,540	Rp 77,895,660	
5	NETAMPIN	Rp 554,589,600	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 301,029,600	Rp 120,411,840	Rp 30,102,960	Rp 105,360,360	Rp 45,154,440	
6	SUMBER GARUNGGUNG	Rp 598,115,300	Rp 48,000,000	Rp 255,960,000	Rp 294,155,300	Rp 117,662,120	Rp 29,415,530	Rp 102,954,355	Rp 44,123,295	
7	MUARA AWANG	Rp 599,387,200	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 326,627,200	Rp 130,650,880	Rp 32,662,720	Rp 114,319,520	Rp 48,994,080	
8	DAMBUNG	Rp 899,105,600	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 626,345,600	Rp 250,538,240	Rp 62,634,560	Rp 219,220,960	Rp 93,951,840	
		Rp 5,958,404,900	Rp 372,000,000	Rp 1,770,480,000	Rp 3,815,924,900	Rp 1,526,369,960	Rp 381,592,490	Rp 1,335,573,715	Rp 572,388,735	
VI	PEMATANG KARAU									
1	MUARA PLANTAU	Rp 1,040,935,100	Rp 54,000,000	Rp 230,760,000	Rp 756,175,100	Rp 302,470,040	Rp 75,617,510	Rp 264,661,285	Rp 113,426,265	
2	KETAB	Rp 790,352,200	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 536,792,200	Rp 214,716,880	Rp 53,679,220	Rp 187,877,270	Rp 80,518,830	
3	KUPANG BERSIH	Rp 931,576,600	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 684,016,600	Rp 273,606,640	Rp 68,401,660	Rp 239,405,810	Rp 102,602,490	
4	TUYAU	Rp 635,463,300	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 356,703,300	Rp 142,681,320	Rp 35,670,330	Rp 124,846,155	Rp 53,505,495	
5	PINANG TUNGGAL	Rp 431,351,000	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 189,791,000	Rp 75,916,400	Rp 18,979,100	Rp 66,426,850	Rp 28,468,650	
6	NAGALEAH	Rp 465,373,000	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 217,813,000	Rp 87,125,200	Rp 21,781,300	Rp 76,234,550	Rp 32,671,950	
7	LAMPEONG	Rp 627,582,400	Rp 42,000,000	Rp 224,760,000	Rp 360,822,400	Rp 144,328,960	Rp 36,082,240	Rp 126,287,840	Rp 54,123,360	
8	BARARAWA	Rp 673,593,700	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 426,033,700	Rp 170,413,480	Rp 42,603,370	Rp 149,111,795	Rp 63,905,055	
9	BAMBULUNG	Rp 964,726,400	Rp 60,000,000	Rp 246,360,000	Rp 658,366,400	Rp 263,346,560	Rp 65,836,640	Rp 230,428,240	Rp 98,754,960	
10	LEBO	Rp 539,926,600	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 292,366,600	Rp 116,946,640	Rp 29,236,660	Rp 102,328,310	Rp 43,854,990	
11	MURU DUYUNG	Rp 446,024,300	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 179,264,300	Rp 71,705,720	Rp 17,926,430	Rp 62,742,505	Rp 26,889,645	
12	TUMPUNG ULUNG	Rp 555,724,300	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 282,964,300	Rp 113,185,720	Rp 28,296,430	Rp 99,037,505	Rp 42,444,645	
13	SUMBER REJO	Rp 452,737,900	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 205,177,900	Rp 82,071,160	Rp 20,517,790	Rp 71,812,265	Rp 30,776,685	
		Rp 8,555,366,800	Rp 576,000,000	Rp 2,821,080,000	Rp 5,158,286,800	Rp 2,063,314,720	Rp 515,828,680	Rp 1,805,400,380	Rp 773,743,020	
VII	KECAMATAN PAJU EPAT									
1	JURU BANU	Rp 546,499,800	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 279,739,800	Rp 111,895,920	Rp 27,973,980	Rp 97,908,930	Rp 41,960,970	
2	TELANG BARU	Rp 557,226,900	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 284,466,900	Rp 113,786,760	Rp 28,446,690	Rp 99,563,415	Rp 42,670,035	
3	TAMPU LANGIT	Rp 532,301,800	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 259,541,800	Rp 103,816,720	Rp 25,954,180	Rp 90,839,630	Rp 38,931,270	
4	TELANG	Rp 503,616,500	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 236,856,500	Rp 94,742,600	Rp 23,685,650	Rp 82,899,775	Rp 35,528,475	
5	MAIPE	Rp 444,227,400	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 171,467,400	Rp 68,586,960	Rp 17,146,740	Rp 60,013,590	Rp 25,720,110	
6	MURUTUWU	Rp 464,667,300	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 197,907,300	Rp 79,162,920	Rp 19,790,730	Rp 69,267,555	Rp 29,686,095	
7	BALAWA	Rp 585,146,700	Rp 36,000,000	Rp 227,160,000	Rp 321,986,700	Rp 128,794,680	Rp 32,198,670	Rp 112,695,345	Rp 48,298,005	
8	KALINAPU	Rp 425,028,600	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 158,268,600	Rp 63,307,440	Rp 15,826,860	Rp 55,394,010	Rp 23,740,290	
9	SIONG	Rp 521,980,000	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 255,220,000	Rp 102,088,000	Rp 25,522,000	Rp 89,327,000	Rp 38,283,000	
		Rp 4,580,695,000	Rp 342,000,000	Rp 2,091,960,000	Rp 2,146,735,000	Rp 858,694,000	Rp 214,673,500	Rp 751,357,250	Rp 322,010,250	

VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH									
1	PURI	Rp 544,706,600	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 265,946,600	Rp 106,378,640	Rp 26,594,660	Rp 93,081,310	Rp 39,891,990	
2	LENGGANG	Rp 434,908,600	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 187,348,600	Rp 74,939,440	Rp 18,734,860	Rp 65,572,010	Rp 28,102,290	
3	BATUAH	Rp 500,056,200	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 246,496,200	Rp 98,598,480	Rp 24,649,620	Rp 86,273,670	Rp 36,974,430	
4	UNSUM	Rp 487,545,100	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 208,785,100	Rp 83,514,040	Rp 20,878,510	Rp 73,074,785	Rp 31,317,765	
5	BARUYAN	Rp 452,617,000	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 199,057,000	Rp 79,622,800	Rp 19,905,700	Rp 69,669,950	Rp 29,858,550	
6	TURAN AMIS	Rp 515,617,000	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 242,857,000	Rp 97,142,800	Rp 24,285,700	Rp 84,999,950	Rp 36,428,550	
7	MALINTUT	Rp 472,654,700	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 199,894,700	Rp 79,957,880	Rp 19,989,470	Rp 69,963,145	Rp 29,984,205	
8	TANGKUM	Rp 472,339,000	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 193,579,000	Rp 77,431,600	Rp 19,357,900	Rp 67,752,650	Rp 29,036,850	
9	SIBUNG	Rp 604,053,400	Rp 42,000,000	Rp 255,960,000	Rp 306,093,400	Rp 122,437,360	Rp 30,609,340	Rp 107,132,690	Rp 45,914,010	
		Rp 4,484,497,600	Rp 408,000,000	Rp 2,026,440,000	Rp 2,050,057,600	Rp 820,023,040	Rp 205,005,760	Rp 717,520,160	Rp 307,508,640	
IX	KECAMATAN PAKU									
1	TAMPA	Rp 529,522,900	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 281,962,900	Rp 112,785,160	Rp 28,196,290	Rp 98,687,015	Rp 42,294,435	
2	KALAMUS	Rp 718,984,600	Rp 54,000,000	Rp 277,560,000	Rp 387,424,600	Rp 154,969,840	Rp 38,742,460	Rp 135,598,610	Rp 58,113,690	
3	SIMPANG BANGKUANG	Rp 403,619,900	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 156,059,900	Rp 62,423,960	Rp 15,605,990	Rp 54,620,965	Rp 23,408,985	
4	PATUNG	Rp 382,800,000	Rp 42,000,000	Rp 205,560,000	Rp 135,240,000	Rp 54,096,000	Rp 13,524,000	Rp 47,334,000	Rp 20,286,000	
5	RUNGGU RAYA	Rp 466,824,700	Rp 48,000,000	Rp 205,560,000	Rp 213,264,700	Rp 85,305,880	Rp 21,326,470	Rp 74,642,645	Rp 31,989,705	
6	BANTAI NAPU	Rp 401,170,000	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 134,410,000	Rp 53,764,000	Rp 13,441,000	Rp 47,043,500	Rp 20,161,500	
7	TARINSING	Rp 379,844,500	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 113,084,500	Rp 45,233,800	Rp 11,308,450	Rp 39,579,575	Rp 16,962,675	
8	PAKU BETO	Rp 464,789,100	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 192,029,100	Rp 76,811,640	Rp 19,202,910	Rp 67,210,185	Rp 28,804,365	
9	GANDRUNG	Rp 553,890,400	Rp 42,000,000	Rp 252,360,000	Rp 259,530,400	Rp 103,812,160	Rp 25,953,040	Rp 90,835,640	Rp 38,929,560	
10	PANGKAN	Rp 569,135,000	Rp 36,000,000	Rp 230,760,000	Rp 302,375,000	Rp 120,950,000	Rp 30,237,500	Rp 105,831,250	Rp 45,356,250	
11	KUPANG BARU	Rp 442,041,400	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 169,281,400	Rp 67,712,560	Rp 16,928,140	Rp 59,248,490	Rp 25,392,210	
12	LUAU JAWUK	Rp 429,697,700	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 156,937,700	Rp 62,775,080	Rp 15,693,770	Rp 54,928,195	Rp 23,540,655	
		Rp 5,742,320,200	Rp 504,000,000	Rp 2,736,720,000	Rp 2,501,600,200	Rp 1,000,640,080	Rp 250,160,020	Rp 875,560,070	Rp 375,240,030	
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG									
1	DAYU	Rp 700,270,000	Rp 48,000,000	Rp 230,760,000	Rp 421,510,000	Rp 168,604,000	Rp 42,151,000	Rp 147,528,500	Rp 63,226,500	
2	WURAN	Rp 605,144,800	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 363,584,800	Rp 145,433,920	Rp 36,358,480	Rp 127,254,680	Rp 54,537,720	
3	IPU MEA	Rp 462,225,800	Rp 54,000,000	Rp 205,560,000	Rp 202,665,800	Rp 81,066,320	Rp 20,266,580	Rp 70,933,030	Rp 30,399,870	
4	LAGAN	Rp 454,651,800	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 181,891,800	Rp 72,756,720	Rp 18,189,180	Rp 63,662,130	Rp 27,283,770	
5	PUTUT TAWULUH	Rp 440,686,500	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 199,126,500	Rp 79,650,600	Rp 19,912,650	Rp 69,694,275	Rp 29,868,975	
6	SIMPANG NANENG	Rp 418,811,500	Rp 42,000,000	Rp 230,760,000	Rp 146,051,500	Rp 58,420,600	Rp 14,605,150	Rp 51,118,025	Rp 21,907,725	
7	KANDRIS	Rp 380,067,400	Rp 36,000,000	Rp 205,560,000	Rp 138,507,400	Rp 55,402,960	Rp 13,850,740	Rp 48,477,590	Rp 20,776,110	
		Rp 3,461,857,800	Rp 294,000,000	Rp 1,514,520,000	Rp 1,653,337,800	Rp 661,335,120	Rp 165,333,780	Rp 578,668,230	Rp 248,000,670	
		Rp 54,059,229,400	Rp 4,332,000,000	Rp 22,912,680,000	Rp 26,814,549,400	Rp 10,725,819,760	Rp 2,681,454,940	Rp 9,420,372,290	Rp 4,022,182,410	

Pt. BUPATI BARITO TIMUR



H. SURIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2018

CONTOH FORMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

.....,.....2018

Kepada :

Nomor : / .../...../2018

Yth. Bupati Barito Timur

Lampiran : 1 (satu) berkas

Up. Kepala DPMD

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi

Kabupaten Barito Timur

Dana Desa (ADD) Tahap...(..%)

Tahun Anggaran 2018

di-

Barito Timur

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018,
berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor . . Tahun 2018 tentang Tata
cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018, maka bersama ini kami mohon
agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sehingga
kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen
terlampir sebagai berikut :

- b. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Rekomendasi Camat);
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%)(tahap sebelumnya);
- d. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%)(tahap sebelumnya);

- e. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2018;
- f. Surat Keputusan Kepala Desatentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Barito Timur kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../... /Ds-.../.../2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Timur, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap ... (....%) Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa

pada tanggal,2018

KEPALA DESA

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2018
DESA

Pagu Dana Desa Rp.

KODE				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
REKENIN							
G							
1				2	3	4	5=(3-4)
1				PENDAPATAN			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
				-Tahap Pertama (60%)			
				-Tahap Kedua (40%)			
				JUMLAH PENDAPATAN			
2				BELANJA			
				Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1			Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2			Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			

JUMLAH BELANJA						
SURPLUS / (DEFISIT)						
3			PEMBIAYAAN			
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1	Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH PEMBIAYAAN						
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran						

.....,
.....2018

Di Setujui oleh
KEPALA DESA

PTPKD

(.....)

(.....)

NIAP. 161 001 107 ..

Plt. BUPATI BARITO TIMUR,

H. SURIANSYAH